



# RENCANA KERJA (RENJA)

DPPKBP3A  
KABUPATEN  
BANYUMAS

# 2022

RENCANA KERJA (RENJA)  
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2022



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

**” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, yaitu:

Misi 2: “ Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan”.

Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Banyumas Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah untuk:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagian pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama tahun 2022.

#### **1.4. SISTEMATIKA**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun  $n-2$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( $n-1$ ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

menguraikan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2020**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp. 16.840.474.906,00. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 11.822.470.000,00- dan belanja langsung sebesar Rp 5.018.004.906,00. Dalam pelaksanaannya terjadi refocusing anggaran dampak pandemi covid 19 menjadi Rp 15.701.660.615,00 dengan belanja tidak langsung sebesar Rp.5.018.004.906,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.073.026.742,- (88,58 %). Sedangkan pagu anggaran belanja langsung (Perubahan Oktober 2020) sebesar Rp 10.883.655.709,00 dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp 6.244.095.922,- (57,37 %).

Penyerapan anggaran tertinggi dan terendah yaitu pada program:

1. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak (anggaran Rp. 48.049.000,00 dengan realisasi Rp. 48.049.000,00) tertinggi 100 %;
2. Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB (anggaran Rp. 7.627.505.000,00 dengan realisasi Rp. 3.381.806.913,00) terendah 44,33 %;

DPPKBP3A Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 7 program dan 29 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat  
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
(tahun berjalan) DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: DPPKBP3A

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	35	23	25	35	140	0	35	100
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	10	6	8	8	100	0	8	80
	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	anak	2.30	2.09	2.50	2.29	108	0	2.29	99
	Rasio Ketergantungan	%	49.0	46.89	49.0	41.85	85	0	41.85	85
Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB dalam program KKBPK	Kelompok	15	8	12	4	33	0	4	26

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah kebijakan (Perda /Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	aturan	1	1	1	0	33	0	1	100
Pengadaan Sarana, Pengolahan dan Pelaporan data/Informasi Program KKBPK	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa	Desa	331	331	331	331	100	0	331	100
Pelayanan KIE Program KKBPK	Jumlah anggota BKB, BKR dan BKL ber KB	Orang	15150	24447	24150	22059	91	0	22059	145
Pembinaan bagi petugas dan Kader tentang Program KKBPK	Jumlah petugas dan kader KKBPK	Orang	400		800	993	124	0	993	248
	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Orang	331	993	1324	2020	152	0	3013	910
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Buah	14		11	11	100	0	11	78
Program Pelayanan Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	%	74	75.48	70	73.67	105	0	73.67	99
	Angka Kelahiran Total TFR	Orang	2.25	2.31	2.28	2.1	107	0	2.1	93
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Orang	5550	1	5606	12176	-17	0	17839	321
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	42.00	42.54	39.00	44.30	113	0	44.30	105

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	74	45.8	70	73.67	105	0	73.67	99
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	70	83.2	69	79.99	115	0	79.99	114
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	60	81.83	59	80.92	137	0	80.92	134
	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	46.50	41.53	46.80	74.64	159	0	74.64	160
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	%	82.81	73.91	81.31	76.27	93	0	76.27	92
	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	%	76.89	74.9	76.39	73.67	96	0	73.67	95
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)	%	0.24		0.28	1.36	-285	0	1.36	566
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Kelompok	100	95	95	10	10	0	10	10
Peningkatan kapasitas dan kelembagaan KRR	Jumlah kelembagaan kelompok kesehatan reproduksi remaja	Kelompok	8	16	32	31	96	0	47	587
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah peserta KB yang berasal dari masyarakat miskin	Orang	3500	1303	14000	10695	76	0	11998	342
Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang didayagunakan	Kelompok	1279		5116	4559	89	0	4559	356

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Buah	15	14	40	10	25	0	24	160
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Dimasyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak	Kelompok	27	108	108	108	100	0	216	800
Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana bagi PIK-R/M, PKB Kecamatan, PPKBD dan Sub PPKBD, Faskes	Jenis	4	8	16	16	100	0	24	600
Penurunan Stunting (KB) (DAK)	BKB Kit Stunting	Set	5		5	5	100	0	5	100
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	%	100		100	92.53	92	0	92.53	92
	Persentase realisasi fisik program	%	100	25	100	100	100	0	100	100
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	12	12	12	12	100	0	24	200
	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun	1	1	1	1	100	0	2	200
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Kali	1	2	1	1	100	0	3	300
	Jasa instruktur kegiatan yang dibayar	Kali	24	0	0	16	100	0	16	66
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	100	0	24	200
	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	100	0	24	200
	cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	6	6	6	6	100	0	6	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	alat listrik dan elektronik yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	100	0	24	200
	bahan perlengkapan kerja tersedia	Bulan	12	2	12	12	100	0	14	116
	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Bulan	12	12	12	12	100	0	24	200
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang	13	13	14	14	100	0	14	107
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	60		12	12	100	0	12	20
	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	100	0	24	200
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	100	0	24	200
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis	31	7	108	28	25	0	35	112
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis	113	153	83	80	96	0	233	206
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintah dalam kondisi baik	Rumah	2	2	2	2	100	0	2	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit	192	189	189	189	100	0	189	98

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit	13	13	12	12	100	0	12	92
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang	27	27	27	27	100	0	27	100
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	dokumen survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	Dokumen	1	0	1	0	100	0	0	0
	survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kali	1	0	1	0	100	0	0	0
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	25	100	100	100	0	100	100
	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	25	100	100	100	0	100	100
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1	2	1	1	100	0	3	300
	Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	Bulan	12	12	12	12	100	0	24	200
	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Bulan	12	12	12	12	100	0	24	200
Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan pemutakhiran data yang dilaksanakan	Dokumen	1	2	1	1	100	0	3	300
	Kegiatan pelayanan informasi perencanaan yang dilaksanakan	Bulan	12	12	12	12	100	0	24	200

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	100	0	100	100	100	0	100	100
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	0	100	100	100	0	100	100
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Gender (KKG)	Jumlah pelaksanaan kesetaraan gender (KKG)	Keg	3	2	1	1	100	0	3	100
Advokasi dan Evaluasi PUG	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai tim Pokja PUG Focal Point	SKPD	28	0	0	28	100	0	28	100
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	SKPD	15	10	0	28	100	0	28	186
Meningkatkan kualitas pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87.67	87.94	87.64	88.27	100	0	88.27	100
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan	%	0.45		0.48	0.0019	199	0	0.0019	0
	Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49		49	49	100	0	49	100
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	24	22	24	11	45	0	11	45

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	0	100	100
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	0	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rasio KDRT	%	0.0013	0.0014	0.0016	0.0031	6	0	0.0031	238
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus kekerasan yang tertangani sesuai standar	Kasus	64	110	70	78	111	0	188	293
Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu dan PP ASI	Jumlah ibu hamil risiko tinggi yang mendapatkan tambahan nutrisi	Orang	1,000	250	300	725	241	0	975	97500
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah regulasi yang ditetapkan	Buah	1	2	1	1	100	0	3	300
Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitator perempuan pada organisasi kemasyarakatan yang mengikuti pelatihan	organisasi	60	60	30	30	100	0	90	150
Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan)	Kelompok	35		32	32	100	0	32	91
	Rasio anak korban kekerasan	%	0.006		0.009	0.012	66	0	0.012	200
	Preferensi kekerasan pada anak perempuan	%	29.32		33.11	34.38	96	0	34.38	117
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas perlindungan khusus anak	fasilitasi kegiatan kabupaten dan kecamatan layak anak	Kec	27	24	108	99	91	0	123	455
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah kasus anak yang ditangani	Kasus	50	97	70	54	77	0	151	302
	RAD perlindungan anak perlu diperbaiki	Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	0	0	0	0	0	0,24	0	0
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	0	0	0	0	0	1	0	0
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	0
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) yang mendapatkan pendidikan kependudukan	Sekolah	0	0	0	0	0	1	0	0
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pendidikan kependudukan	Kelompok	0	0	0	0	0	1	0	0
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	informasi	0	0	0	0	0	331	0	0
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku umpan balik kependudukan yang tersedia	Buku	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	0	0	0	0	0	100	0	0
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0	0	0	0	0	41,00	0	0
	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	0	0	0	0	0	65	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	620	0	0
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE Program KKBPK yang tersedia (DAK BOKB)	Jenis	0	0	0	0	0	3	0	0
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang operasionalnya terfasilitasi (DAK BOKB)	gedung	0	0	0	0	0	27	0	0
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Orang	0	0	0	0	0	331	0	0
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kegiatan penyuluhan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terfasilitasi (DAK BOKB)	Keg	0	0	0	0	0	48	0	0
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	Unit	0	0	0	0	0	60	0	0
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusi (DAK BOKB)	Paket	0	0	0	0	0	25	0	0
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB MKJP baru (DAK BOKB)	Orang	0	0	0	0	0	6050	0	0
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang tersedia (DAK fisik reguler KB)	Jenis	0	0	0	0	0	3	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	0	0	0	0	0	180	0	0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terfasilitasi kegiatannya (DAK BOKB)	Desa	0	0	0	0	0	160	0	0
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	0	0	0	0	0	18.52	0	0
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	Kelompok	0	0	0	0	0	15	0	0
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terpenuhi (APBD)	Jenis	0	0	0	0	0	2	0	0
	Jumlah pengadaan KIT siap nikah anti stunting, pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit stunting yang terpenuhi (DAK fisik penugasan penurunan stunting)	Jenis	0	0	0	0	0	2	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi (DAK BOKB)	Keg	0	0	0	0	0	25	0	0
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	6	0	0
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	0	100	0	0
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	0	100	0	0
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	0	0	0	0	0	100	0	0
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	0	100	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	7	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	7	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	0	0	0	0	0	12	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	0	0	0	0	0	34	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	0	0	0	0	0	27	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	0	0	0	0	0	15	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	0	0	0	0	0	4	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	0	0	0	0	0	10	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	0	0	0	0	3	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	0	0	0	0	0	12	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	177	0	0
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	2	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	12	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	10	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	0	0	0	0	0	610	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	0	0	0	0	0	19	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	0	0	0	0	0	45	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	0	0	0	0	0	5	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	0	0	0	0	0	12	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	0	0	0	0	0	800	0	0
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	0	0	0	0	0	135000	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	0	0	0	0	0	200	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	0	0	0	0	0	20	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	0	0	0	0	0	12	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	0	0	0	0	0	1	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	0	0	0	0	0	81	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	0	0	0	0	0	100	0	0
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	0	0	0	0	0	22	0	0
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan PUG	OPD	0	0	0	0	0	29	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	2	0	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	lembaga	0	0	0	0	0	45	0	0
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan KIE PP untuk kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	2	0	0
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Orang	0	0	0	0	0	11	0	0
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	2	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan advokasi	Orang	0	0	0	0	0	100	0	0
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	0	0	0	0	0	100	0	0
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	0	0	0	0	0	74	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan (APBD)	Keg	0	0	0	0	0	6	0	0
	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan (DAK PPPA)	Keg	0	0	0	0	0	2	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	2	0	0
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kasus	0	0	0	0	0	14	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang melaporkan (APBD)	Kasus	0	0	0	0	0	50	0	0
	Jumlah kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan yang terfasilitasi (DAK PPPA)	Keg	0	0	0	0	0	50	0	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	lembaga	0	0	0	0	0	1	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasanyang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	2	0	0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang tersedia	lembaga	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0	0	0	0	0	00.01	0	0
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	2	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	keluarga	0	0	0	0	0	60	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	0	0	0	0	0	35.71	0	0
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	Laporan	0	0	0	0	0	1	0	0
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	OPD	0	0	0	0	0	10	0	0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	0	0	0	0	0	100	0	0
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	lembaga	0	0	0	0	0	28	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas KLA yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	4	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0	0	0	0	0	0.009	0	0
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	0	0	0	0	0	53	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak (DAK PPPA)	Keg	0	0	0	0	0	2	0	0
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	anak	0	0	0	0	0	60	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap anak yang terfasilitasi	Keg	0	0	0	0	0	60	0	0

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
  - 1. Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
  - 2. Seksi Pendayagunaan Penyuluhan KB; dan
  - 3. Seksi Data dan Informasi;
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari
  - 1. Seksi Pelayanan KB; dan
  - 2. Seksi Keluarga Sejahtera;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan; dan
  - 2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perlindungan Anak; dan
  - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp.18.130.474.422,00 terurai dalam 10 program dan 24 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,85	1,31	1,19	64,89%	0,12
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,64	88,27	88,20	100,72%	0,07
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,50	71,92	68,11	106,55%	3,81
4	Kabupaten Layak Anak (KLA)	600	528	528	88,00%	0

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPPKBP3A  
Kabupaten Banyumas

No.	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2020	2021	2022	2023	2020	2021 (s/d Tw2)	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak			2,50	2,50	2,40	2,30	2,29	0	2,40	2,30	
2	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%			100	100	100	100	100	0	100	100	
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%			39	40,00	41,00	42,00	44,30	0	41,00	42,00	
4	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi	%			0	50	65	80	0	0	65	80	
5	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%			0	7,41	18,52	25,93	0	0	18,52	25,93	
6	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%			0	100	100	100	0	0	100	100	
7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%			22	22	22	22	22	0	22	22	
8	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%			100	100	100	100	100	0	100	100	
9	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait	%			0	0,008	0,01	0,05	0	0	0,01	0,05	

	peningkatan kualitas keluarga												
10	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%			100	28,57	35,71	42,86	100	0	35,71	42,86	
11	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%			0	100	100	100	0	0	100	100	
12	Rasio anak korban kekerasan	Angka			0,009	0,011	0,009	0,007	0,012	0	0,009	0,007	

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk;
- b. Belum optimalnya kualitas pembangunan perempuan;
- c. Belum optimalnya kualitas pemberdayaan perempuan;
- d. Belum optimalnya kualitas perlindungan anak.

#### Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Treatment*). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

#### A. *Strenght* (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. SDM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 32 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 7 orang atau 21,87 %, S-1 sebanyak 15 orang atau 46,87 %, pendidikan SMA sebanyak 10 orang atau 31,25 %, pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 3,12 %, Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Sarana dan Prasarana  
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas di dalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### B. *Weakness* (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsi teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
  - b. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
  - a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis pada unit lini (Bidang Pemberdayaan Perempuan tanpa ASN pelaksana, Bidang Perlindungan Anak hanya 2 ASN);
  - b. Kesetaraan gender yang belum optimal dibandingkan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Jateng dan kabupaten sekitar ditunjukkan dengan nilai capaian IDG dan IPG yang masih di bawah provinsi dan kabupaten sekitar;
  - c. Masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif;
  - d. Belum optimalnya keaktifan dan optimalisasi organisasi di bidang pemberdayaan perempuan;
  - e. Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG;
  - f. Masih tingginya kekerasan terhadap anak berdasarkan rasio anak korban kekerasan yang tinggi;
  - g. Belum maksimalnya proses pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 karena belum terbentuknya lembaga khusus layanan perlindungan perempuan dan anak ;
  - h. Belum terpenuhinya standar untuk Kabupaten Layak Anak dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - i. Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) secara merata (tiap OPD) sesuai standar;
  - j. Jumlah Forum Anak yang aktif belum merata (Forum Anak tingkat kecamatan);
  - k. Belum terlaksananya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif.
3. Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Pertumbuhan penduduk yang masih belum terkendalikan berdasarkan hasil indikator LPP;
- b. Rata-rata jumlah anak per keluarga masih lebih dari 2;
- c. Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun;
- d. Menurunnya tingkat keberlangsungan peserta KB aktif;
- e. Menurunnya pasangan usia subur yang ber KB berdasarkan Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) yang tidak terpenuhi;
- f. Masih kurangnya Petugas PLKB/PKB mengingat ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas mengampu 2(dua) desa/kelurahan lebih;
- g. Masih rendahnya Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB.

### C. *Opportunity* (Peluang)

Dari analisis *strength* dan *weakness*, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
4. Meningkatnya komitmen dan dukungan Pemerintah dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

5. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Komitmen dan dukungan Pemerintah dalam pembiayaan (DAK/APBD) yang berkelanjutan dalam pembangunan dan pengembangan Keluarga Berencana.
7. Kesadaran masyarakat dalam berorganisasi baik di perkotaan dan pedesaan guna mengintegrasikan program-program pemerintah.

#### D. *Treatment* (Ancaman)

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait perspektif gender.
2. Permasalahan perekonomian (kemiskinan) yang berdampak pada permasalahan keluarga dan meningkatnya terhadap eksploitasi anak (tenaga kerja belia).
3. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dan adaptasi yang baik di masyarakat berdampak pada pola kehidupan konsumerisme.
4. Pola pikir masyarakat yang semakin heterogen sehingga berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah seperti Program KB.
5. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk.
6. Munculnya Kejadian Luar Biasa wabah pandemi Covid -19.

Berdasarkan analisa SWOT di atas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- ✓ Masih minimnya keterlibatan stakeholders (bidang-bidang terkait) perangkat daerah pada setiap proses penyusunan perencanaan pembangunan;
- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan;
- ✓ Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis;
- ✓ Tuntutan manajemen yang seringkali tidak sinkron dengan perencanaan yang sudah dibuat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPPKBP3A di atas, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra DPPKBP3A Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas analisis dalam perencanaan di lingkungan perangkat daerah;
2. Meningkatkan kesesuaian antara capaian kinerja OPD terhadap RPJMD;
3. Meningkatkan realisasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
4. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi perangkat daerah;
5. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan;
6. Meningkatkan kualitas analisis dalam perencanaan bidang perangkat daerah;
7. Meningkatkan pelayanan perkantoran;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan internal perangkat daerah.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2022 menunjukkan DPPKBP3A memiliki 10 program dan 24 kegiatan.

**Tabel T-C.31.**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**  
**DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
TOTAL				9.495.406.000	0	9.436.102.000	18.931.508.000		19.089.728.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,78	165.592.000	0	8.981.587.000	9.147.179.000	1,77	9.187.304.000
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,01					0,01	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2,40	82.839.000	0	0	82.839.000	2,30	83.532.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	Kebijakan	1	67.740.000	0	0	67.740.000	1	68.307.000
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	Dokumen	1	30.107.000	0	0	30.107.000	1	30.359.000
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) yang berperan aktif	Sekolah	2	15.053.000	0	0	15.053.000	2	15.179.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pendidikan kependudukan	Kelompok	1	22.580.000	0	0	22.580.000	1	22.769.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	informasi	331	15.099.000	0	0	15.099.000	331	15.225.000
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku umpan balik kependudukan yang tersusun	Buku	1	15.099.000	0	0	15.099.000	1	15.225.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	0	0	8.982.651.000	8.982.651.000	100	9.057.722.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	Keg	620	0	0	2.216.886.000	2.216.886.000	640	2.235.414.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi KIE dengan menggunakan KIE Kit yang dilaksanakan	Kali	648	0	0	163.384.000	163.384.000	648	164.750.000
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang operasionalnya terfasilitasi.	Unit	27	0	0	2.053.502.000	2.053.502.000	27	2.070.664.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Orang	662	0	0	2.208.984.000	2.208.984.000	662	2.227.445.000
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kegiatan penyuluhan PKB/PLKB yang terfasilitasi	Keg	1000	0	0	1.594.504.000	1.594.504.000	1000	1.607.830.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana dan prasarana bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan dan/atau PKB/PLKB yang terfasilitasi / terpenuhi)	Unit	3	0	0	614.480.000	614.480.000	3	619.615.000
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	41,00					42,00	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	Unit	60	0	0	3.217.977.000	3.217.977.000	70	3.244.870.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusi	Paket	25	0	0	173.787.000	173.787.000	25	175.240.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB MKJP baru	Orang	10	0	0	2.166.250.000	2.166.250.000	25	2.184.354.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang kegiatan KIT siap nikah anti stunting dan BKB KIT stunting yang terealisasi	Unit	2	0	0	281.005.000	281.005.000	2	283.353.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak	Kelompok	24	0	0	323.156.000	323.156.000	24	325.856.000
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang dilaksanakan	Keg	15	0	0	273.779.000	273.779.000	18	276.067.000
	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	65					80	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	180	0	0	1.338.804.000	1.338.804.000	200	1.349.993.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terfasilitasi kegiatannya.	Desa	160	0	0	1.338.804.000	1.338.804.000	170	1.349.993.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	18.52	45.668.000	0	0	45.668.000	25.93	46.050.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS yang dilaksanakan	pertemuan	235	45.668.000	0	0	45.668.000	240	46.050.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terpenuhi	Unit	6	25.597.000	0	0	25.597.000	8	25.811.000
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	Keg	6	20.071.000	0	0	20.071.000	6	20.239.000
SEKRETARIAT (PENDUKUNG)				9.037.781.000	0	0	9.037.781.000		9.113.314.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	9.037.781.000	0	0	9.037.781.000	100	9.113.314.000
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	7	30.106.000	0	0	30.106.000	7	30.358.000
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	7	8.594.000	0	0	8.594.000	7	8.666.000
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	30	21.512.000	0	0	21.512.000	30	21.692.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100					100	
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	6.146.315.000	0	0	6.146.315.000	12	6.197.683.000
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	34	6.017.354.000	0	0	6.017.354.000	34	6.067.644.000
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	27	128.961.000	0	0	128.961.000	27	130.039.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100					100	
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	15	121.168.000	0	0	121.168.000	17	122.180.000
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	4	34.761.000	0	0	34.761.000	4	35.051.000
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	10	82.393.000	0	0	82.393.000	10	83.082.000
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	3	4.014.000	0	0	4.014.000	4	4.047.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Bulan	12	553.353.000	0	0	553.353.000	12	557.978.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	177	196.001.000	0	0	196.001.000	177	197.639.000
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	2	13.548.000	0	0	13.548.000	2	13.661.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	12	67.792.000	0	0	67.792.000	14	68.359.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	10	276.012.000	0	0	276.012.000	10	278.319.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100					100	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	610	789.325.000	0	0	789.325.000	620	795.921.000
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	19	20.067.000	0	0	20.067.000	20	20.235.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	50	100.359.000	0	0	100.359.000	53	101.197.000
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	5	28.012.000	0	0	28.012.000	5	28.246.000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	368.704.000	0	0	368.704.000	12	371.785.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	12	70.803.000	0	0	70.803.000	12	71.395.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	200	201.380.000	0	0	201.380.000	200	203.063.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	20	1.397.514.000	0	0	1.397.514.000	20	1.409.194.000
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	124.461.000	0	0	124.461.000	12	125.501.000
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	1	3.311.000	0	0	3.311.000	1	3.339.000
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	81	1.269.742.000	0	0	1.269.742.000	81	1.280.354.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71,93	329.118.000	-	453.451.000	782.569.000	71,94	789.110.000
	Nilai Kabupaten Layak Anak		625					650	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	11	187.669.000	0	0	187.669.000	12	189.237.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah	Orang	5100	12.043.000	0	0	12.043.000	5200	12.143.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan	Keg	2	12.043.000	0	0	12.043.000	3	12.143.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	lembaga	45	20.071.000	0	0	20.071.000	45	20.239.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan KIE PP untuk kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	2	20.239.000
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22					22	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Orang	11	155.555.000	0	0	155.555.000	11	156.855.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan	Keg	2	5.017.000	0	0	5.017.000	2	5.059.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan advokasi	Orang	100	150.538.000	0	0	150.538.000	100	151.796.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	95.337.000	0	171.257.000	266.594.000	100	268.823.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	74	35.124.000	0	0	35.124.000	73	35.418.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	3	20.239.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	Keg	2	15.053.000	0	0	15.053.000	3	15.179.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kasus	14	15.053.000	0	171.257.000	186.310.000	13	187.867.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani	pengaduan	74	0	0	171.257.000	171.257.000	73	172.688.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang tersedia	Layanan	6	15.053.000	0	0	15.053.000	6	15.179.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	lembaga	4	45.160.000	0	0	45.160.000	4	45.538.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	3	20.239.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang tersedia	lembaga	4	25.089.000	0	0	25.089.000	4	25.299.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	%	00.01	20.071.000	0	0	20.071.000	00.05	20.239.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	keluarga	60	20.071.000	0	0	20.071.000	65	20.239.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	2	20.239.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	35.71	5.017.000	0	0	5.017.000	42.86	5.059.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data gender dan anak yang tersusun	data	10	5.017.000	0	0	5.017.000	12	5.059.000
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	OPD	10	5.017.000	0	0	5.017.000	12	5.059.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan)	%	100	21.024.000	0	0	21.024.000	100	21.199.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total		
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif	lembaga	15	21.024.000	0	0	21.024.000	20	21.199.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas KLA yang dilaksanakan	Keg	4	21.024.000	0	0	21.024.000	5	21.199.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan yang tertangani	Angka	0.009	0	0	282.194.000	282.194.000	0.007	284.553.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Kasus	53	0	0	282.194.000	282.194.000	50	284.553.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan kekerasan pada anak yang dilaporkan.	pengaduan	53	0	0	282.194.000	282.194.000	50	284.553.000

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel C-T.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : DPPKBP3A

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Program</b> Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Perempuan				
	<b>Kegiatan</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	<b>Sub Kegiatan</b> <i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah kegiatan KIE PP untuk kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang dilaksanakan	Kec. Ajibarang	2 keg	Pelatihan bagi perempuan Rp. 20.000.000 (Poker)

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”***. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2022 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 ditujukan pada ***“Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”***, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

#### **Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2022**

sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa ke arah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan *output* dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah;
4. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;
5. Pengembangan smart government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

DPPKBP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah (Dinas) yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas, membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk kebijakan teknis di bidang pengendalian Penduduk dan KB serta pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas yaitu: Misi 2 : ***"Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan"***.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan
	Meningkatkan kualitas perlindungan anak

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. DPPKBP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas di Kab. Banyumas. Tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

DPPKBP3A mempunyai 10 program dan 25 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh empat bidang dan sekretariat serta sub unit kerja UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2022 yaitu Rp 18.864.266.179,00 dengan sumber pendanaan APBD Kab sebesar Rp 9.461.408.554,00 , APBD Provinsi Rp 0 dan APBN Rp 9.402.857.625,00. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 pada tabel T-C.33:

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023  
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Banyumas**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
TOTAL				9.461.408.554	0	9.402.857.625	18.864.266.179		19.022.728.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,78	165.592.000	0	8.981.587.000	9.147.179.000	1,77	9.187.304.000	
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,01					0,01		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2,4	82.832.000	0	0	82.832.000	2,3	83.532.000	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1	67.733.000	0	0	67.733.000	1	68.307.000	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	Dokumen	1	30.100.000	0	0	30.100.000	1	30.359.000	
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) yang mendapatkan pendidikan kependudukan	Sekolah	1	15.053.000	0	0	15.053.000	1	15.179.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pendidikan kependudukan	Kelompok	1	22.580.000	0	0	22.580.000	1	22.769.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	informasi	331	15.099.000	0	0	15.099.000	331	15.225.000	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku umpan balik kependudukan yang tersedia	Buku	1	15.099.000	0	0	15.099.000	1	15.225.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	0	0	8.104.652.000	8.104.652.000	100	8.172.446.000	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	Keg	620	0	0	2.216.886.000	2.216.886.000	640	2.235.414.000	
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE Progam KKBPK yang tersedia (DAK BOKB)	Jenis	3	0	0	163.384.000	163.384.000	3	164.750.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang operasionalnya terfasilitasi (DAK BOKB)	gedung	27	0	0	2.053.502.000	2.053.502.000	27	2.070.664.000	
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah kegiatan pengendalian dan monitoring yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	0	0	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Orang	331	0	0	1.594.500.000	1.594.500.000	331	1.607.830.000	
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah petugas dan kader KKBPK yang terfasilitasi kegiatannya	Orang	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana dan prasarana bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan dan/atau PKB/PLKB yang terfasilitasi / terpenuhi)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kegiatan penyuluhan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terfasilitasi (DAK BOKB)	Keg	48	0	0	1.594.500.000	1.594.500.000	48	1.607.830.000	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	41,00					42,00		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	Unit	60	0	0	2.954.466.000	2.954.466.000	70	2.979.209.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusi (DAK BOKB)	Paket	25	0	0	173.787.000	173.787.000	25	175.240.000	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB MKJP baru (DAK BOKB)	Orang	6050	0	0	2.166.250.000	2.166.250.000	6100	2.184.354.000	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang tersedia (DAK fisik reguler KB)	Jenis	3	0	0	614.429.000	614.429.000	3	619.615.000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak	Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	0	0	
	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	65					80		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	180	0	0	1.338.800.000	1.338.800.000	200	1.349.993.000	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terfasilitasi kegiatannya (DAK BOKB)	Desa	160	0	0	1.338.800.000	1.338.800.000	170	1.349.993.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	18.52	82.760.000	0	876.935.000	959.695.000	25.93	931.326.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	Kelompok	15	82.760.000	0	876.935.000	959.695.000	20	931.326.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terpenuhi (APBD)	Jenis	2	42.495.000	0	280.000.000	322.495.000	2	309.164.000	
	Jumlah pengadaan KIT siap nikah anti stunting, pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit stunting yang terpenuhi (DAK fisik penugasan penurunan stunting)	Jenis	2					2		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi (DAK BOKB)	Keg	25	0	0	596.935.000	596.935.000	25	601.923.000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	Keg	6	40.265.000	0	0	40.265.000	6	20.239.000	
SEKRETARIAT (PENDUKUNG)				8.966.698.554	0	0	8.966.698.554		9.078.314.000	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	8.966.698.554	0	0	8.966.698.554	100	9.078.314.000	
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	29.787.500	0	0	29.787.500	4	30.358.000	
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	4.201.500	0	0	4.201.500	3	8.666.000	
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	25.586.000	0	0	25.586.000	1	21.692.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		0	0		100		
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	6.148.954.000	0	0	6.148.954.000	3	6.197.683.000	
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	34	6.017.354.000	0	0	6.017.354.000	34	6.067.644.000	
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	20	131.600.000	0	0	131.600.000	20	130.039.000	
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100		0	0		100		
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	156.197.500	0	0	156.197.500	3	122.180.000	
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	4	34.365.500	0	0	34.365.500	4	35.051.000	
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	10	82.832.000	0	0	82.832.000	10	83.082.000	
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	3	39.000.000	0	0	39.000.000	4	4.047.000	
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	530.750.000	0	0	530.750.000	4	557.978.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	177	195.950.000	0	0	195.950.000	177	197.639.000	
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	2	15.000.000	0	0	15.000.000	2	13.661.000	
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	72.300.000	0	0	72.300.000	14	68.359.000	
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	10	247.500.000	0	0	247.500.000	10	278.319.000	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		0			100		
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	766.894.364	0	0	766.894.364	6	770.921.000	
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	20.344.500	0	0	20.344.500	1	20.235.000	
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	91.320.000	0	0	91.320.000	4	91.197.000	
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	2	24.356.864	0	0	24.356.864	2	23.246.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	358.695.000	0	0	358.695.000	12	361.785.000	
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	800	70.803.000	0	0	70.803.000	850	71.395.000	
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	135000		0	0		136000		
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	200	201.375.000	0	0	201.375.000	200	203.063.000	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	1.334.115.190	0	0	1.334.115.190	3	1.399.194.000	
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	115.336.110	0	0	115.336.110	12	115.501.000	
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	1	3.000.000	0	0	3.000.000	1	3.339.000	
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	78	1.215.779.080	0	0	1.215.779.080	78	1.280.354.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71,93	329.118.000	0	421.270.625	750.388.625	71,94	757.110.000	
	Nilai Kabupaten Layak Anak		625					650		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	187.669.000	0	0	187.669.000	100	189.237.000	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan PUG	OPD	29	12.043.000	0	0	12.043.000	29	12.143.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan	Keg	2	12.043.000	0	0	12.043.000	3	12.143.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	lembaga	45	20.071.000	0	0	20.071.000	45	20.239.000	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan KIE PP untuk kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	2	20.239.000	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22		0			22		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Orang	11	155.555.000	0	0	155.555.000	11	156.855.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan	Keg	2	5.017.000	0	0	5.017.000	2	5.059.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan advokasi	Orang	100	150.538.000	0	0	150.538.000	100	151.796.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	95.337.000	0	156.076.625	251.413.625	100	253.823.000	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	74	35.124.000	0	22.778.000	57.902.000	73	59.027.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan (APBD)	Keg	6	20.071.000	0	22.778.000	42.849.000	6	43.848.000	
	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan (DAK PPPA)	Keg	2		0			2		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	Keg	2	15.053.000	0	0	15.053.000	3	15.179.000	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kasus	16	15.053.000	0	133.298.625	148.351.625	17	149.258.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang melaporkan (APBD)	Kasus	52	15.053.000	0	133.298.625	148.351.625	53	149.258.000	
	Jumlah kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan yang terfasilitasi (DAK PPPA)	Keg	51		0			52		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	lembaga	1	45.160.000	0	0	45.160.000	1	45.538.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	3	20.239.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang tersedia	lembaga	1	25.089.000	0	0	25.089.000	1	25.299.000	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapat pengarahannya terkait peningkatan kualitas keluarga	%	00.01	20.071.000	0	0	20.071.000	00.05	20.239.000	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	2	20.239.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	keluarga	60	20.071.000	0	0	20.071.000	65	20.239.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	35.71	5.017.000	0	0	5.017.000	42.86	5.059.000	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	Laporan	1	5.017.000	0	0	5.017.000	1	5.059.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	OPD	10	5.017.000	0	0	5.017.000	12	5.059.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100	21.024.000	0	0	21.024.000	100	21.199.000	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	lembaga	28	21.024.000	0	0	21.024.000	28	21.199.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas KLA yang dilaksanakan	Keg	4	21.024.000	0	0	21.024.000	5	21.199.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.009	0	0	265.194.000	265.194.000	0.007	267.553.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	53	0	0	29.833.000	29.833.000	50	31.192.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023		Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak (DAK PPPA)	Keg	2	0	0	29.833.000	29.833.000	2	31.192.000	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	anak	62	0	0	235.361.000	235.361.000	63	236.361.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap anak yang terfasilitasi	Keg	61	0	0	235.361.000	235.361.000	62	236.361.000	

Sub Unker : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL		
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	35,000,000	0	0	35,000,000	100	35,000,000

X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	3	25,000,000	0	0	25,000,000	3	25,000,000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	10,000,000	0	0	10,000,000	5	10,000,000
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	5,000,000	0	0	5,000,000	1	5,000,000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	10,000,000	0	0	10,000,000	12	10,000,000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	10,000,000	0	0	10,000,000	1	10,000,000
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	10,000,000	0	0	10,000,000	12	10,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	0	0	17,061,500	17,061,500	100	17,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	lembaga	1	0	0	17,061,500	17,061,500	1	17,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan (DAK PPA)	Keg	1	0	0	17,061,500	17,061,500	1	17,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.009	0	0	15,180,250	15,180,250	0.007	15,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang berperan aktif	lembaga	1	0	0	15,180,250	15,180,250	1	15,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan (DAK PPA)	Keg	1	0	0	15,180,250	15,180,250	1	15,000,000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

**Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023  
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
TOTAL				9.461.408.554	0	9.402.857.625	18.864.266.179	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,78	165.592.000	0	8.981.587.000	9.147.179.000	
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,01					
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2,4	82.832.000	0	0	82.832.000	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1	67.733.000	0	0	67.733.000	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang tersusun	Dokumen	1	30.100.000	0	0	30.100.000	
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) yang mendapatkan pendidikan kependudukan	Sekolah	1	15.053.000	0	0	15.053.000	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah kelompok yang terfasilitasi pendidikan kependudukan	Kelompok	1	22.580.000	0	0	22.580.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	informasi	331	15.099.000	0	0	15.099.000	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku umpan balik kependudukan yang tersedia	Buku	1	15.099.000	0	0	15.099.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	0	0	8.104.652.000	8.104.652.000	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	Keg	620	0	0	2.216.886.000	2.216.886.000	
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE Progam KKBPK yang tersedia (DAK BOKB)	Jenis	3	0	0	163.384.000	163.384.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang operasionalnya terfasilitasi (DAK BOKB)	gedung	27	0	0	2.053.502.000	2.053.502.000	
<b>Pengendalian Program KKBPK</b>	<b>Jumlah kegiatan pengendalian dan monitoring yang dilaksanakan</b>	<b>Keg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Orang	331	0	0	1.594.500.000	1.594.500.000	
<b>Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</b>	<b>Jumlah petugas dan kader KKBPK yang terfasilitasi kegiatannya</b>	<b>Orang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan dan/atau PKB/PLKB yang terfasilitasi / terpenuhi</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kegiatan penyuluhan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terfasilitasi (DAK BOKB)	Keg	48	0	0	1.594.500.000	1.594.500.000	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	41,00					
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	Unit	60	0	0	2.954.466.000	2.954.466.000	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusi (DAK BOKB)	Paket	25	0	0	173.787.000	173.787.000	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB MKJP baru (DAK BOKB)	Orang	6050	0	0	2.166.250.000	2.166.250.000	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang tersedia (DAK fisik reguler KB)	Jenis	3	0	0	614.429.000	614.429.000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak	Kelompok	0	0	0	0	0	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang dilaksanakan	Keg	0	0	0	0	0	
	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	65					
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	180	0	0	1.338.800.000	1.338.800.000	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terfasilitasi kegiatannya (DAK BOKB)	Desa	160	0	0	1.338.800.000	1.338.800.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	18.52	82.760.000	0	876.935.000	959.695.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	Kelompok	15	82.760.000	0	876.935.000	959.695.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terpenuhi (APBD)	Jenis	2	42.495.000	0	280.000.000	322.495.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
	Jumlah pengadaan KIT siap nikah anti stunting, pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit stunting yang terpenuhi (DAK fisik penugasan penurunan stunting)	Jenis	2					
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terfasilitasi (DAK BOKB)	Keg	25	0	0	596.935.000	596.935.000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	Keg	6	40.265.000	0	0	40.265.000	
SEKRETARIAT (PENDUKUNG)				8.966.698.554	0	0	8.966.698.554	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	8.966.698.554	0	0	8.966.698.554	
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	29.787.500	0	0	29.787.500	
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	4.201.500	0	0	4.201.500	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	25.586.000	0	0	25.586.000	
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		0	0		
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	6.148.954.000	0	0	6.148.954.000	
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	34	6.017.354.000	0	0	6.017.354.000	
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	20	131.600.000	0	0	131.600.000	
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100		0	0		
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	156.197.500	0	0	156.197.500	
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	4	34.365.500	0	0	34.365.500	
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	10	82.832.000	0	0	82.832.000	
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	3	39.000.000	0	0	39.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	530.750.000	0	0	530.750.000	
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	177	195.950.000	0	0	195.950.000	
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	2	15.000.000	0	0	15.000.000	
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	72.300.000	0	0	72.300.000	
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	10	247.500.000	0	0	247.500.000	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		0			
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	766.894.364	0	0	766.894.364	
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	20.344.500	0	0	20.344.500	
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	91.320.000	0	0	91.320.000	
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	2	24.356.864	0	0	24.356.864	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	358.695.000	0	0	358.695.000	
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	800	70.803.000	0	0	70.803.000	
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	135000		0	0		
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	200	201.375.000	0	0	201.375.000	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	1.334.115.190	0	0	1.334.115.190	
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	115.336.110	0	0	115.336.110	
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	1	3.000.000	0	0	3.000.000	
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	78	1.215.779.080	0	0	1.215.779.080	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71,93	329.118.000	0	421.270.625	750.388.625	
	Nilai Kabupaten Layak Anak		625					

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	187.669.000	0	0	187.669.000	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan PUG	OPD	29	12.043.000	0	0	12.043.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan	Keg	2	12.043.000	0	0	12.043.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	lembaga	45	20.071.000	0	0	20.071.000	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan KIE PP untuk kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22		0			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Orang	11	155.555.000	0	0	155.555.000	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan	Keg	2	5.017.000	0	0	5.017.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan advokasi	Orang	100	150.538.000	0	0	150.538.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	95.337.000	0	156.076.625	251.413.625	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	74	35.124.000	0	22.778.000	57.902.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan (APBD)	Keg	6	20.071.000	0	22.778.000	42.849.000	
	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan (DAK PPPA)	Keg	2		0			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	Keg	2	15.053.000	0	0	15.053.000	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kasus	16	15.053.000	0	133.298.625	148.351.625	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang dilaporkan (APBD)	Kasus	52	15.053.000	0	133.298.625	148.351.625	
	Jumlah kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan yang terfasilitasi (DAK PPPA)	Keg	51		0			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	lembaga	1	45.160.000	0	0	45.160.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang tersedia	lembaga	1	25.089.000	0	0	25.089.000	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	%	00.01	20.071.000	0	0	20.071.000	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Keg	2	20.071.000	0	0	20.071.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	keluarga	60	20.071.000	0	0	20.071.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	35.71	5.017.000	0	0	5.017.000	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	Laporan	1	5.017.000	0	0	5.017.000	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	OPD	10	5.017.000	0	0	5.017.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100	21.024.000	0	0	21.024.000	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	lembaga	28	21.024.000	0	0	21.024.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas KLA yang dilaksanakan	Keg	4	21.024.000	0	0	21.024.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.009	0	0	265.194.000	265.194.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	53	0	0	29.833.000	29.833.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak (DAK PPPA)	Keg	2	0	0	29.833.000	29.833.000	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	anak	62	0	0	235.361.000	235.361.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap anak yang terfasilitasi	Keg	61	0	0	235.361.000	235.361.000	

Sub Unker : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	35,000,000	0	0	35,000,000	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	3	25,000,000	0	0	25,000,000	
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	10,000,000	0	0	10,000,000	
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	5,000,000	0	0	5,000,000	
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	10,000,000	0	0	10,000,000	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	10,000,000	0	0	10,000,000	
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	10,000,000	0	0	10,000,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	0	0	17,061,500	17,061,500	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab	APBD Prov	APBN	TOTAL	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif	lembaga	1	0	0	17,061,500	17,061,500	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan (DAK PPA)	Keg	1	0	0	17,061,500	17,061,500	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.009	0	0	15,180,250	15,180,250	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang berperan aktif	lembaga	1	0	0	15,180,250	15,180,250	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan (DAK PPA)	Keg	1	0	0	15,180,250	15,180,250	

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. DPPKBP3A dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2021 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

Purwokerto, 30 September 2021

Kepala DPPKBP3A  
Kabupaten Banyumas



SUYANTO, S.H., M.Hum  
Pembina Utama Muda

NIP. 19621101 199203 1 007

